

DINAMIKA INDUSTRI MEDIA ISLAM DI INDONESIA SEBAGAI GERAKAN DAKWAH

Halimatus Sa'diyah¹, Muchamad Suradji²

02040720013@student.uinsby.ac.id , msuradji@unisda.ac.id

Abstrak: Dinamika Islam di Indonesia telah banyak dilihat melalui segala aspek. Saat ini masih sangat sedikit yang melihat media massa sebagai gerakan dakwah. Bahkan, berkembangnya pemikiran dakwah dan gerakan Islam di suatu tempat memungkinkan menjadi insiprasi tempat lain melalui media massa. Saat ini media massa telah menjadi industri yang lebih besar. Untuk mengkaji pembahasan tersebut, penulis menggunakan studi literature yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam kajian ini dapat diambil kesimpulan penting antara lain dinamika media Islam sebagai gerakan dakwah seorang Da'i merupakan tumpuan informasi *rahmatat li'alamin* yang sesuai dengan cerminan Dakwah Rasullullah SAW.

Kata Kunci: Industri Media, Islam dan Dakwah

¹ Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

² Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

PENDAHULUAN

Pasca tumbangnya rezim Soeharto, suasana keberlangsungan dan kebebasan pers di Indonesia mengundang perhatian banyak pihak. Bukan hanya aktif di belantara pers saja, namun juga beberapa kelompok umat Islam yang sebelumnya sama sekali tidak bersentuhan, justru saat ini mulai menggeliat penuh semangat berjihad melalui media massa. Kehadiran media Islam yang tidak diimbangi dengan semangat berjihad sangat meresahkan. Banyak sekali media Islam cenderung mengemas isu atas nama Syariah Islam secara konfrontatif dan bombastis.

Tulisan ini dihadirkan untuk menyingkap lebih jauh dinamika industri media Islam di Indonesia dengan melihat media massa sebagai salah satu gerakan dakwah. Serta memberi pemikiran motif apa dan bagaimana banyak pihak memanfaatkan media massa sebagai instrumen gerakan dakwah. Bagi penulis, hal ini perlu disorot dan dikritisi sebab manakala dibiarkan maka bisa jadi kebebasan pers tersebut disalahgunakan (*abuse of press freedom*) yang seharusnya tidak terjadi.

Pengamat media Islam, Agus Sudibyo mengatakan bahwa menjelang akhir dekade 90-an, masyarakat menyaksikan gerakan Islam militan yang mencoba menampilkan Islam dengan cara yang berbeda dengan *mainstream*. Mereka tidak hanya menampilkan diri dalam bentuk identitas dan simbol keislaman yang mencolok, tetapi juga hadir dalam bentuk perjuangan yang khas, mulai dari tuntutan penerapan syariat Islam hingga penggerebekan tempat-tempat yang dianggap sarang maksiat.

Pada saat bersamaan, muncul juga media-media Islam dalam format yang boleh dikatakan berbeda dari media-media Islam sebelumnya, baik dari segi penyajian maupun isu yang diangkat. Dari segi penyajian, menurut Agus Sudibyo media-media ini menggunakan bahasa yang tegas, lugas dan berani, bahkan cenderung provokatif. Sementara, dari segi isu yang diangkat, media-media ini juga menurunkan tema-tema yang sensitif, termasuk yang berkenaan dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), tentu saja dengan pendekatan yang sangat mencerminkan kepentingan Islam³.

³ Agus Sudibyo, Ibnu Hamad dan Muhammad Qodari, *Kabar-kabarKebencian, Prasangka Agama di Media Massa*, Jakarta: ISAI, 2001, hlm. 34.

PEMBAHASAN

Sejarah Industri Media Islam

Adanya media massa memungkinkan lahir terinspirasi dari sebuah tokoh muslim yang dianggap idola dari pembaca media massa yang tidak bertemu langsung dan berguru, hanya bertemu lewat sebuah karya di media massa. Seperti dinamika umat Islam dunia pada salah satu tokoh dengan pemikiran dan gerakan islam yang dilakukan oleh Jamaluddin al-Afghani' (1838 - 1897) dan Muhammad Abduh (1849 - 1905). Dua tokoh yang memiliki pemikiran dan gerakan untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari cengkraman kolonialisme. Mereka menerbitkan surat kabar *al-'Urwafi al-Wutsqo* pada tahun 1884 di Prancis. Walau hanya terbit selama delapan bulan, dengan 18 edisi, yaitu 13 Maret 1884 - 17 Oktober 1884.

Melihat dari sejarahnya, media massa Islam lebih terbuka untuk semua kalangan, tidak kaku dalam membangun wacana, mencerahkan, bahkan sebagainya ekstrem. Contohnya adalah mimbar yang meyuguhkan rubrik khusus Kristologi pada tahun 1960an. Media massa Islam pada masa saat itu pula juga terbiasa dengan ideologi-ideologi kiri dan nasionalis, hal ini secara tidak langsung pula memberikan sumbangsih pendidikan yang lebih terbuka dan memberikan pilihan berfikir dengan argumentasi yang jelas. Dengan modal ciri khas yang dijabarkan tersebut, media massa Islam memiliki keunggulan yang dapat dijadikan modal besar untuk bertahan meski dengan beberapa syarat. Modal utama yang dimaksud adalah solidaritas antara pengelola dengan khalayaknya.

Media massa yang dibangun oleh kelompok atau organisasi tertentu harusnya memiliki hubungan erat sebagai kekuatan keluarga besar. Tentu pula ini juga yang membuat jamaah dari ormas atau kelompok Islam merasa memiliki media massanya. Sejarah masuknya media Islam di Indonesia bermula saat *Al Imam*, sebuah media massa Islam pertama ditanah Melayu-Nusantara sekitar tahun 1906, yang saat itu masih dijajah oleh Inggris dan Belanda. Sejak awal media ini memang menyuarakan akan nasib yang dialami oleh umat muslim yang terjajah, sehingga dalam salah satu edisinya, *Al Imam* pernah mengatakan Tanah Sumatera, Tanah Monado, Tanah Jawa, Tanah Borneo dalam genggaman Belanda, hingga tanah melayu Penisula dalam cengkraman Inggris.

Tujuan *Al Imam* menulis seperti itu agar umat Islam sadar dan mampu meraih kemerdekaannya⁴.

Pada awal abad ke 20 tumbuh media massa Islam diawali terbit di Sumatera pada tahun 9 Januari 1904 bernama Alam Minangkabau berbahasa Arab Jawi, wilayah distribusinya hanya menjangkau pada muslimin di Minangkabau, Mandailing dan Angkola. Pada tahun 1911 terbit *Al Munir* di Padang. Alam Minangkabau dan *Al Munir* merupakan cikal bakal koran Islam di Indonesia⁵. Majalah *Al-Munir* sebagai media gerakan kaum muda minangkabau dipimpin Abdullah Ahmad. Pemberitaan majalah *Al Munir* dipengaruhi pemberitaan oleh majalah *Al Imam* yang terbit di Singapura dan *Al Manar* yang terbit di Mesir.

Al Munir seringkali merujuk pada fatwa-fatwa yang terdapat dalam *Al Manar*, seperti membahas pakaian barat, yang pada masa itu sering dilarang oleh ulama tradisional karena identik dengan orang kafir. Pada praktiknya, *Al Munir* tidak hanya bersuara keras terhadap praktik bid'ah, tetapi juga pada pemerintah kolonial Belanda. Kritik keras ini membuat *Al Munir* mendapat tekanan dan pengawasan dari pemerintah kolonial saat itu. *Al Munir* juga tidak jarang meyuarkan tentang kemerdekaan bangsa Hindia Belanda, ketatnya pengawas kolonial, membuat mereka menyampaikannya secara hati-hati dan terselubung. Misalnya dengan membahas kemerdekaan Turki, Mesir dan India dari jeratan penjajah. Ketika membahas suatu tulisan tentang ilmu pengetahuanpun, ujung-ujungnya juga akan membahas bagaimana mencapai kemerdekaan⁶.

1. Surat Kabar di Masa Kolonialisme

Surat kabar hadir di Indonesia pada abad ke-17 yang diterbitkan secara terbatas oleh kepemimpinan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Surat kabar ini masih berbahasa Belanda. Berita yang dimuat pada surat kabar, masih seputar negara Eropa, seperti Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris dan Denmark. Terbitan berkala pertama bernama, *Kozt Bercht dropa*, dicetak tahun 1676. Sedangkan surat kabar yang dapat dinikmati oleh publik tertentu, *Bataviase Nouvelles*, yang hadir pada

⁴ Roni Tabaroni, *Media Massa Islam Sejarah, Dinamika dan Peranannya di Masyarakat*. (Yogyakarta:Calpulis).2017. hal 5.

⁵ Moh. Rosyid, *Membingkai Sejarah Islam di Tengah Terpaan Era Digital.At-Tabsyir*, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 1, Nomer 1, Januari-Juni 2013. hal 3.

⁶ Sastri Sunarti, *Kajian Lintas media: Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbitan Awal di Minangkabau 1859-1940an*. (Jakarta: KPG). 2013.

tahun 1744. Sesudah itu, 23 Mei 1780 terbit *Vendu Nleuws*, atau 40 tahun setelah kehadiran *Bataviase Nouvelles*.

Surat kabar harian pertama di Batavia adalah *Bataviasche Koloniale Courant*, terbit di Batavia tahun 1810. Sedangkan mesin cetak pertama di Indonesia dibawa oleh seorang warga Belanda bernama W. Bruining dari Rotterdam yang kemudian menerbitkan surat kabar bernama *Het Bataviasche Advertantie Blad*. Surat kabar ini memuat iklan-iklan dan berita-berita umum yang dikutip dari penerbitan resmi di Nederland (*Staatscourant*). Surat kabar pada abad 17 dan 18 masih berbentuk sederhana, baik penampilan *design grafis* dan *layout* maupun mutu. Ketika di Eropa mulai marak usaha penerbitan, para pengusaha persurat-kabaran serta para kuli tinta asal Belanda sejak masa awal pemerintahan VOC, sudah berani membuka usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar di Batavia. Tidak hanya di Batavia, Jakarta hari ini, surat kabar berkembang tetapi juga di Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Daerah ini, dicatat sebagai daerah yang paling tua untuk mengenai surat kabar.

Khairul Jasmi (2002) dalam artikel yang sangat panjang berjudul *Surat Kabar Minang, Konfigurasi Pemikiran yang Menakutkan*, menyatakan pers (media cetak) di Sumatera Barat adalah pers yang relatif tua. Ditandai dengan terbitnya, *Soematra Courant*, *Padang Handelsblad* dan *Bentara Melajoe*. Sejak 1859 sampai kemerdekaan, tercatat 81 penerbitan di Minangkabau. Hendra Naldi (2008) dan Yuliandre Darwis (2013) juga menyatakan, penerbitan surat kabar di Minangkabau sebuah gerakan pemikiran untuk memerjuangkan kemerdekaan⁷.

Selain daerah Sumatera Barat, surat kabar juga terbit di Surabaya, tahun 1835. Namanya, *Soerabajash Advertentieblad*, yang berganti nama menjadi *Soerabajash Niews en Advertentieblad*. Di Semarang terbit *Semarangsche Advertentieblad* dan *Semarangsche Courant*. Sedangkan di Ujung Pandang, terbit *Celebe Courant* dan di Makasar, *Makassazch Handelsblad*. Surat-surat kabar yang terbit pada masa ini tidak mempunyai arti secara politis, karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Tirasnya tidak lebih dari 1000-1200 eksemplar setiap kali terbit. Semua penerbit terkena peraturan, setiap penerbitan tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh penguasa setempat. Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat

⁷ Mafri Amir, *Historiografi Pers*. Bandingkan dengan Hendra Naldi, *Booming Surat Kabar di Sumatra's Westkust* (Yogyakarta: Ombak, 2008). hal 45.

16 surat kabar berbahasa Belanda, dan 12 surat kabar berbahasa melayu di antaranya adalah *Bintang Barat*, *Hindia Nederland*, *Dinihari*, *Bintang Djohar*, *Selompret Melayu* dan *Tjahaja Moelia*, *Pemberitaan Bahroe* (Surabaya) dan surat kabar berbahasa jawa *Bromartani* yang terbit di Solo⁸.

Memasuki abad ke-20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat dan semarak. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Beberapa kebijakan mulai di kritisi. Misalnya, peraturan sentralisasi kekuasaan (*centrallisatie wetgeving*).

Pemerintah Belanda bisa melunak jika sebuah masalah sudah dimuat di surat kabar. Bahkan petinggi pemerintah mulai terbuka atas kritik dan saran. Banyak sekali surat kabar menyajikan ruang surat pembaca untuk menampung aspirasi. Apalagi ketika sudah ada perwakilan rakyat buatan Belanda (*Volksraad*), pada tahun 1916. Berita politik mulai marak, kritik- kritik mulai berani disuarakan melalui surat kabar.

Surat kabar *Medan Prijaji* yang terbit pada tahun 1903, merupakan surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi yang mulai berani mengkritisi kebijakan pemerintah. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa Indonesia terjun dalam dunia media massa yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya *Inheemsche*.

Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni *Guntur Bergerak* dan *Hindia Bergerak*. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian *Benih Merdeka* dan *Sinar Merdeka* pada tahun 1918 dan 1922. Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian *Suara Rakyat Indonesia*, *Sinar Hindia*, *Sinar Indonesia* dan *Sinar Merdeka* di tahun 1926. Penerbitan pergerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun ada juga yang terang-terangan.

Karena sudah meresahkan pemerintah waktu itu, muncul peraturan kebebasan menyuarakan pesan yang tertuang dalam undang-undang; Pers *Ordonantie* tahun 1931 tentang pembredelan surat kabar. Jauh sebelumnya, juga sudah ada *Drukpers Reglement* tahun 1856 tentang aturan sensor preventif. Sikap perlawanan dan kritis terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui surat kabar tersebut membuat tokoh

⁸ Mas' oed Abidin, *Ensiklopedia Minangkabau*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003). hal 356.

pergerakan, Soekarno, Hatta dan Syahrir dibuang ke Boven Digul. Dan penguasa tertinggi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936) dan Gubernur Jenderal Tjarda van Star sangat terganggu dengan artikel-artikel *gezagsvijandige* atau tulisan-tulisan yang memusuhi pemerintah.

Serikat Islam di bawah kepemimpinan Tirta Adhi Soerjo terus mengembang sayap organisasi melalui surat kabar. Selain menerbitkan *Oetoesan Hindia*, tiga tahun sesudahnya, tahun 1916 menerbitkan majalah *Al Islam*. Beberapa cabang SI juga menerbitkan majalah, seperti cabang Bandung menerbitkan, *Pantjaran Warta*, sedangkan cabang Semarang menerbitkan *Sinar Djawa*. *Al Islam* sangat jelas memiliki kecenderungan politik yang frontal sekaligus radikal. Menggelorakan agama dan politik. Lebih maju menggulirkan hak untuk memerintah di tanah sendiri. *Al Islam* menggunakan istilah *Bangsa Islam tanah Hindia*.

Selain cabang-cabang Serikat Islam menerbitkan media cetak, tokoh-tokohnya juga menerbitkan media cetak sendiri. H. Agus Salim bersama Abdul Muis, menerbitkan harian *Neratja*. Harian yang berorientasi politik. Agus Salim nantinya akan dikenal juga melalui harian *Hindia Baru*, *Bendera Islam*, *Fajar Asia*. *Hindia Baru* (1925-1930), Agus Salim berduet dengan Tjokroaminoto. Sedangkan *Fajar Asia* bersama Kartosuwirjo. *Fajar Asia* terkenal kritis, gigih membuka bobrok pemerintah kolonial. Salah satunya praktek kuli kontrak di perkebunan Sumatera (*poenale sanctie*), kerja rodi (*heerendlenst*) dan eksploitasi tanah sewa kontrak (*erfpacfit*)⁹.

Setiap daerah tokoh-tokoh dan organisasi Islam juga memiliki gairah untuk menerbitkan media cetak, seperti di Padang, Jogjakarta, Makassar, Semarang, Surabaya dan lain-lain. Di Jogjakarta, tempat lahirnya Muhammadiyah, pada tahun 1915, terbit *Medan Muslimin*, yang diprakarsai Fachrudin. Tokoh Muhammadiyah, murid KH. Ahmad Dahlan. Sebelum menerbitkan *Medan Muslimin*, Fachruddin menjadi koresponden *Doenia Bergerak*. Fachruddin juga tercatat pernah menjadi pemimpin redaksi (*Hoofdredacteur*), *Srie Diponegoro* (1918), *Soewara Moehammadiyah* dan *Bintang Islam*¹⁰.

⁹ dalam Hendra Naldi, *Booming Suret Kabar...* dan Mas'oe'd Abidin, *Ensiklopedia Minangkabau ...*, Yogyakarta: Pustaka Ombak, 2016, hal 54.

¹⁰ *Ibid.*

Selain Muhammadiyah, ada organisasi Persatuan Islam (Persis), juga menerbitkan majalah *Pembela Islam*, pada tahun 1929. Tokohnya, A. Hassan, Fachruddin al-kahiri dan M. Natsir. *Pembela Islam* selalu mengambil posisi frontal dengan media sekuler. Perdebatan sengit Soekarno dengan M. Natsir terjadi berawal di sini. Terutama tema negara Islam dan sekularisme. Selain perdebatan terbuka melalui media dengan tokoh sekuler, juga dengan ummat Islam. Natsir berdebat langsung dengan Rahmat Ali dari Ahmadiyah Qadian, pada tahun 1933. Natsir juga menyerang misionaris yang telah melakukan pelecehan terhadap Islam. Tulisannya sangat fenomenal dalam *Pembela Islam* berjudul *Zending Contra Islam* (1931)¹¹.

Organisasi Nahdatul Ulama, menerbitkan *Suara NU*, *Berita NU*, *Soeloeh NU*. Langsung dipimpin KH. A. Wahid Hasyim, didampingi KH. Mahfudz Shiddiq. Majalah-majalah NU banyak membicarakan persoalan pesantren dan madrasah. Media cetak dari cendekiawan Islam menghiasi pergerakan Indonesia merdeka juga terjadi di Kalimantan, terbit *Persatuan* (Samarinda), *Pelita Islam* (Banjarmasin). Di Bangkalan Madura, terbit *al-Islah*, di Ambon, terbit *Suisma*. Sedangkan di Medan, terbit *Suluh Islam*, *Medan Islam*, *al-Hidayah*, *Menara Putri* dan *Panji Islam*. Tokoh-tokoh yang terekam dalam sejarah, KH. Abdul Madjid Abdullah dan Rangkayo Rasuna Said.

Majalah yang paling terkenal di Medan tahun 1935 adalah *Pedoman Masyarakat*. *Pedoman Masyarakat* sudah mulai memberi ruang kepada penulis selain redaksi, dari berbagai kalangan. Diantaranya seperti Soekarno yang pernah menulis di sini, apalagi tokoh-tokoh Islam, seperti H. Agus Salim M. Natsir dan KH. Mas Mansyur, hingga tokoh perempuan seperti Rangkayo Rasuna Said. *Pedoman Masyarakat* beserta banyak media cetak lainnya dibreidel pada masa Jepang.

Perdebatan sengit adat dan agama di surat kabar membuat gairah membaca dan haus ilmu di kalangan masyarakat sangat meningkat. Saling serang di surat kabar sudah menjadi biasa. Perdebatan agama dan adat tersebut menyangkut *Matriarkat* yang dipandang tak sesuai dengan ajaran Islam. Pada tahun 1900, di Padang terbit surat kabar *Padanger*, gabungan *Sumatra Courant* dan *Nieuw Padangsche de Padanger Handelsblad*. Setahun sesudahnya, kaum muda, para guru dan pegawai

¹¹ Howard M Federspiel, *The Persatuan Islam (Islamic Unions)*, Tesis Phd. Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1966. Hal 47.

bumiputra berpendidikan Barat melahirkan sebuah jurnal bernama *Insoelinde*. Mereka, golongan ini, yakin kemajuan harus dicapai melalui pendidikan modern. Mereka kurang suka pendidikan sekolah agama.

Menurut Taufik Abdullah dalam bukunya, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement In West Sumatera (1927-1933)*, para pengasuh *Insoelinde* tergilagila pada prestasi Jepang. Dimana kebanyakan memuat artikel yang mendesak kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan *Insoelinde*, surat kabar *Wasir Hindia* serta *Bintang Sumatera* yang terbit pada 1903 memuat banyak artikel tentang kemajuan Asia terutama Jepang. Pada 1905 terbit pula *Sinar Sumatera*, disusul *Warta Hindia* pada 1908¹².

Empat surat kabar khusus perempuan juga meramaikan dunia persuratkabaran Sumatera, seperti *Soenting Melajoe* (1911) di Padang yang dipimpin Ratna Djuita, putri Soetan Maharadja yang dibantu Rohana Kudus¹³, *Soeara Perempuan* (1919) yang dipimpin Sa'adah Alim, *Soeara SKIS* (Serikat Kaum Ibu Sumatra, 1938) di Padang Panjang yang dipimpin Encik Djusa'ir, serta *Soera Poetri* di Bukittinggi yang dipimpin Djanewar Djamil dan Sjamsidar Jahja.

Ketika Jepang berkuasa di Sumatera Barat, praktis semua penerbitan gulung tikar. Sepanjang 3,5 tahun itu, hanya ada tiga surat kabar yang sepenuhnya dikendalikan Jepang. *Padang Nippo*, *Sumatra Simbun*, dan *Domei*. Begitu Indonesia merdeka, suasana pun berubah. Para wartawan yang dulu memiliki surat kabar berlomba-lomba menghidupkan kembali surat kabarnya yang dulu mati suri karena ditekan oleh pemerintah Jepang.

2. Media Cetak di Masa Kemerdekaan

Pada periode berikutnya, kehadiran surat kabar dan majalah lebih berbicara pada rencana setelah kemerdekaan. Di Sumatera Barat, masyarakat sangat haus akan berita, terutama mengenai perjuangan dan pergolakan yang berlangsung. Rasa haus itu terpuaskan oleh Bustanuddin yang menghadirkan majalah bulanan *Berdjuang* yang terbit di Padang Panjang pada September 1945. Di kota yang sama, tiga bulan

¹² Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, New York: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971. Hal 90.

¹³ Danil M. Chaniago, *Perempuan Bergerak. Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921*, Jurnal Kafaah, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. IV No.1 Tahun 2014.

kemudian, muncul harian *Demokrai* yang diterbitkan Yusdja dengan pemimpin redaksi M. Joesoef.

Pada 1946, Hamka dan Haskim kembali menghadirkan sebuah majalah di Padang Panjang dengan nama *Menara*. Majalah ini membawa suara golongan Muhammadiyah. Setelah di kota hujan itu, pada September 1945 di Padang hadir pula harian *Utusan Sumatera* yang diterbitkan Bariun A.S. bersama Mulkan, Muchtar Mahyuddin, Marah Alif dan sejumlah nama lain. Pada bulan yang sama pula lahirlah *Suara Sumatera* yang diterbitkan Lie Un Sam. Surat kabar ini dipimpin S. Alaudin. Usianya singkat. Tapi, pemiliknya menerbitkan surat kabar lain, *Harian Penerangan*.

Beberapa penerbitan pers komunitas saat antara lain, *Barito Koto Gadang* (Fort de Hock, 1929-32), *Boedi Tjaniago* (Fort de Hock, Drukkery Agam, 1922), *Soeara Kota Gedang* (Fort de Kock, Vereeniging Studiefonds Kota Gedang, 1916-17), *Al Achbar* (Padang, 1913-14, dalam bahasa Arab), *Al I'lam* (Koto Toeo, Ampat Angkat, 1922-23), *Moeslim Hindia* (Padang, Moeslim India, 1932), *Algementeen Advertieblad* (Padang, Padangsche Snelpres, 1921, dalam bahasa Belanda), *Bintang Tiong Hoa* (Padang, Tiong Hoa Ien Soe Kiok, 1910-15)¹⁴.

Memasuki masa pemerintahan Jepang kehidupan surat kabar lebih dipersempit, selain UU Belanda UU No. 16 yang pasal-pasalanya sangat menakutkan mengenai izin terbit, juga diberlakukan penasehat (*Shidooiin*) dari pemerintah pada surat kabar. Lebih dari itu, semua surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan oleh pemerintah.

Hal tersebut dilakukan agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor berita *Antara* pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita *Yashima* dan selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang, yakni *Domei*. Wartawan- wartawan Indonesia pada saat itu hanya bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang diberi pengaruh serta kedudukan adalah wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada masa Jepang surat

¹⁴ Nasru1 Azwar, *Sejarah Pers Sumber Dialih Orang Liu*, Opini Harian Pagi Padang Ekspres, 2007. Hal 67.

kabar hanya bersifat propaganda dan memuji-muji pemerintah dan tentara Jepang¹⁵.

Salah satu surat kabar yang terbit pada masa ini adalah *Tjahaja* Surat kabar ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan penerbit berada di kota Bandung. Beritanya banyak tentang persoalan di Jepang. Para pemimpinnya di antaranya adalah Oto Iskandar Dinata, R. Bratanata dan Mohamad Kurdi. Pada tampilan tampak bahwa surat kabar tersebut bertuliskan tanggal 24 Shichigatsu 2604, yang pada penanggalan masehi sama dengan tanggal 24 Juli 1944.

Pada masa kemerdekaan, peralatan percetakan biasanya menjadi incaran untuk dikuasai segera seperti sarana vital yang harus direbut, termasuk stasiun radio. Ketika merdeka, posisi surat kabar mulai menguat, yang ditandai oleh mulai beredarnya koran *Soeara Merdeka* (Bandung), *Berita Indonesia* (Jakarta), *Merdeka, Independent, Indonesian News Bulletin, Warta Indonesia, dan The Voice of Free In.*

3. Media Cetak di Masa Orde Lama

Ketika pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda pencitraan pemerintah, Indonesia pun melakukan hal yang sama untuk melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Soeradi melalui *Berita Indonesia* melakukan propaganda agar rakyat berdatangan pada Rapat Raksasa Pilkada pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Akibatnya *Berita Indonesia* berulang kali mengalami pembredelan dimana selama pembredelan tersebut para pegawai kemudian ditampung oleh surat kabar *Merdeka* yang didirikan oleh B.M. Diah.

Kritikan terhadap pemerintah Jepang bukannya berhenti, surat kabar perjuangan lainnya adalah *Harian Rakyat* dengan pemimpin redaksi Samsudin Sutan Makmur dan Rinto Alwi. Surat kabar lainnya yang terbit pada masa ini adalah *Soeara Indonesia, Pedoman Harian* yang berubah menjadi *Soeara Merdeka* (Bandung), *Kedaulatan Rakyat* (Bukittinggi), *Demokrasi* (Padang) dan *Oetoesan Soematra* (Padang).

¹⁵ Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927 - 1933)*. Ithaca : Cornell University, [1971], hal 39.

Pada masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal di bawah komando Soekarno, banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintah parlementer. Surat kabar menjadi alat propaganda dari partai politik. Partai politik memiliki surat kabar sebagai corong partainya. Pada masa itu, media cetak dikenal sebagai media partisipan. Akibatnya pergolakan politik tidak terelakkan dan begitu rawan konflik. Inilah era demokrasi liberal yang membuat Soekarno ingin mengubahnya menjadi demokrasi terpimpin. Februari 1957 Soekarno kembali mengemukakan konsep Demokrasi Terpimpin yang diinginkannya. Tetapi berbagai pemberontakan di banyak daerah di Indonesia mulai terjadi karena mengoreksi Soekarno yang selalu mengambil kebijakan pembangunan yang terpusat Jawa.

Pemberontakan di daerah membuat Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang pada 14 Maret 1957. Selama dua tahun Indonesia terkkurung dalam perseturuan antara parlemen melawan rezim Soekarno yang berkolaborasi dengan militer. Namun, tak berselang lama, Soekarno menerbitkan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 45, disusul dengan pelarangan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi, karena keterlibatan kedua partai tersebut dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958 di Sumatera¹⁶.

Setelah dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno, terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers. Tindakan tekanan terhadap surat kabar terus berlangsung, yaitu pembredelan terhadap kantor berita PIA dan surat kabar *Republlk*, *Pedoman*, *Berita Indonesla*, dan *Sln Po*.

Menteri Muda Penerangan Maladi dalam sambutannya pada HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-14, menyatakan, “hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana dijamin UUD 1945 harus ada batasnya: keamanan negara, kepentingan bangsa, moral dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Maladi menegaskan, langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan yang

¹⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern, Kajian Lintas Media, Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbitan Awal di Minangkabau (1859-1940-an)*, (Jakarta : KPG 2013). Hal 69.

diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional. Tahun 1960 penguasa mulai mengenakan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers. Tahun 1964 kondisi kebebasan pers makin buruk. Kementerian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar perubahan sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan secara sepihak.

Di tengah dinamika politik Orde Lama, Buya Hamka bersama, Faqih Usman, Joesof Abdoellah Poear, dan HM Joesoef Ahmad menerbitkan *Panji Masyarakat* (*Panjimas*). Semula terbit sebagai dwimingguan, kemudian tiga kali sebulan. Hampir seluruh isinya berupa artikel tentang agama. Tetapi setelah melewati umur seperempat abad, isi dan penampilan tata wajahnya (*layout*) lebih mengarah ke majalah berita. Sebagaimana isinya berupa berita aktual dan laporan, dan selebihnya berupa opini. *Panjimas* juga pernah merasakan pahitnya pembredelan oleh rezim orde lama tetapi di orde baru, *Panjimas* terbit kembali.

4. Media Cetak di Masa Orde Baru

Peristiwa G 30 S/PIN bisa dijadikan tanda berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Kemudian bangsa Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada awalnya, Orde Baru menjanjikan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Pemerintah Orde Baru sangat menekankan pentingnya pemahaman tentang pers Pancasila. Dalam rumusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers (Desember 1984), Pers Pancasila adalah Pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi sikap dan tingkah lakunya didasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD'45. Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pers (UUPP) No. II tahun 1966, yang dijamin tidak ada sensor dan pembredelan, serta penegasan setiap warga negara mempunyai hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak diperlukan surat ijin terbit. Namun hal ini hanya berlangsung kurang lebih delapan tahun karena sejak terjadinya "Peristiwa Malari" (Peristiwa Lima Belas Januari 1974), kebebasan pers kembali seperti zaman Orde Lama. Dikekang oleh pemerintah Orde Baru.

Pada periode ini, surat kabar yang dipaksa untuk berafiliasi, seperti *Kedaulatan Rakyat* yang pada zaman orde lama harus berganti menjadi *Dwikora*. Hal ini juga terjadi pada *Pikiran Rakyat* di Bandung. Bahkan pers kampus juga mulai aktif kembali. Namun di balik itu semua, pengawasan dan pengekan pada pers terutama dalam hal konten tetap diberlakukan.

Pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah harus pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP), seperti yang terjadi pada *Sinar Harapan*, tabloid *Monitor* dan *Detik* serta majalah *TEMPO* dan *Editor*. Pers lagi-lagi dibayangi dalam kekuasaan pemerintah yang cenderung memborgol kebebasan pers dalam membuat berita serta menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Pembredalan pun marak pada periode ini.

Alasan Orde Baru, hanya dengan stabilitas politik memungkinkan pembangunan berjalan. Salah satu jalan menciptakan stabilitas politik itu melalui pembatasan kebebasan berpendapat. Dunia pers di masa Orde Baru dikekang melalui peraturan-peraturan yang kembali seperti pada masa penjajahan. Melalui Menteri Penerangan, penerbitan dipantau dari dekat. Tindakan refresif dari militer juga sering terjadi ke ruang-ruang redaksi sebelum penerbitan dilakukan.

Pers dipaksa menjadi alat penerangan pembangunan dan harus patuh terhadap Pancasila. Pers harus pandai menjauhkan “mata kekuasaan” yang bisa menuduh subversif, yang mengakibatkan penjara bagi para awak redaksi dan breidel bagi penerbitan. Karena itu, pers sering menyebut diri mereka sebagai pers Pancasila. Yang bercirikan, bebas dan bertanggungjawab. Sebenarnya, pada masa Orde Baru, pers berkembang baik sebagai lembaga industri¹⁷.

Demokrasi Pancasila disorot sebagai demokrasi yang represif dengan kekuatan militer di bawah komando Soeharto, ketika tanggal 21 Juni 1994, Majalah *TEMPO*, *Detik* dan *Editor*, dicabut izin penerbitannya. Tiga majalah ini dipandang Menteri Penerangan yaitu R.I., Harmoko, yang menganggap diluar batas memuat hasil investigas berbagai penyelewengan penyelenggaraan negara. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat marak, terutama kroni-kroni kekuasaan Cendana. *TEMPO* nantinya terbit kembali setelah reformasi.

¹⁷ Sudirman Teba, *Jurnalistik Baru J*, Jakarta: Kalam Indonesia, 2005.

Salah satu media cetak yang berhaluan Islam yang patut dicatat, adalah *Pnaji Masyarakat (Panjimas)*. *Panjimas* sempat dibredel oleh Soekarno, terbit kembali 5 Oktober 1966 ketika Soeharto mulai berkuasa. Majalah ini beredar tidak hanya di Indonesia, juga di Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia. *Panji Masyarakat* tempat cendekiawan muda pada masa itu mengasah intelektual dalam bidang jurnalistik. Tercatat, cendekiawan muda pada masanya, seperti Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Rusydi Hamka yang pernah aktif menjadi jurnalis di majalah ini¹⁸.

Pada tujuh tahun terakhir sebelum rezim Orde Baru runtuh, sebenarnya kekuatan Islam sedang mendapat tempat yang dapat dikatakan sebagai bagian yang telah diperhatikan secara khusus oleh rezim Orde Baru. Wakil Presiden Baharuddin Jusuf (BJ). Habibie termasuk yang memainkan peran kekuatan tersebut. Sebab Habibie sangat dipercaya oleh Soeharto. Ia diberikan kebebasan melakukan kegiatan politik sejak dipanggil pulang ke Indonesia dari Jerman. BJ. Habibie menggagas lahirnya organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dari ICMI lahir gagasan hingga terbitnya *Harian Republik*. ICMI yang sedang mendapat tempat di pemerintahan melalui BJ. Habibie, mendukung usulan penerbitan surat kabar yang bernuansa Islam. Salah seorang tokoh yang mengusulkan tersebut, Zaim Uchrowi, mantan wartawan *TEMPO*. Surat Izin Usaha Perusahaan Penerbitan (SIUPP) yang memang sulit didapat, melalui ICMI, membuat *Harian Republik* lahir mulus dan terbit perdana pada 4 Januari 1993. Soeharto juga mendukung pengembangan surat kabar ini, pada konteks informasi yang bersifat *pluralism*.

Kelahiran ICMI bukankah sebuah kebetulan sejarah belaka, tetapi erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi.

Seiring dengan itu semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan alternatif bagi perkembangan peradaban dunia. Bagi Barat, kebangkitan Islam ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang

¹⁸ <http://www.panjimas.com/news/2014/09/19/jimly-asshiddiqie-banyak-intelektual-muslim-lahir-dari-panji-masyarakat-pimpinan-rusydi-hamka/> diakses, 10 April 2021, pukul 14.28 WIB.

diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subjektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang bangkit kembali sehingga mengancam dominasi peradaban Barat.

Republika diharapkan dapat menjadi corong pemikiran kalangan cendekiawan muslim, sebagai upaya panjang kalangan umat Islam, menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu. Koran ini terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dilepas ke kelompok Mahaka Media.

5. Media Cetak di Era Reformasi

Runtuhnya rezim Soeharto sebagai tanda lahirnya era reformasi¹⁹. Kebebasan di Indonesia dalam era reformasi ditandai dengan lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam Undang- Undang ini, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4). Izin terbit hanya pendaftaran perusahaan penerbitan di Dewan Pers, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kemenkumham. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2.

Gegap gempita kebebasan pers itu disambut gembira oleh kalangan pers yang selama ini takut kena breidel. Ini ditandai dengan banyak penerbitan yang lahir pada paruh 1999-2002. Namun tidak semua bernasib baik. Persoalan-persoalan pers muncul demikian banyak, baik intern maupun ekstern. Mulai dari upah layak, profesionalisme, juga penumpang gelap pers di era reformasi. Salah satu yang menyulitkan, kebebasan pers dibajak oleh pengusaha-pengusaha yang tergiur dengan belanja iklan. Pers Indonesia memasuki babak oligopoli, dikuasai beberapa orang pebisnis besar, yang menguasai, media cetak, radio, televisi hingga portal *online*.

Setelah berjalan kurang lebih 15 tahun kebebasan pers didapatkan, yang terjadi bukan pers yang sehat. Justru sebaliknya, pers Indonesia masuk jauh ke wilayah politik kepentingan kekuasaan dan politik ekonomi. Industri pers di kebiru pemilik modal dan politisi. Pers Indonesia mengalami kebebasan yang kebablasan.

¹⁹ Abdullah Khusairi, *Gerakan Reformasi Berhenti di Kaki Pelangi*, dalam Harian Umum Independen SINGGALANG. <https://issuu.com/haluan/docs/pdf160111>, diakses pada 10 April 2021.

6. Industri Media Islam Dan Gerakan Dakwah

Di tengah pesta kebebasan saat ini, strategi yang memungkinkan media cetak bernuansa Islami hadir dan mampu memberi penetrasi dan propaganda ke tengah publik, yang harus mengikuti arus pasar dengan tetap membawa misi. Sejumlah media massa Barat menjadikan Islam sebagai obyek sasaran dalam pemberitaan. Secara kolektif, media-media Barat juga dapat dikatakan sebagai eksekutor konspirasi Islamphobia. Hal inilah yang membuat kalangan budaya dan media-media massa dunia Islam gencar mereaksi propaganda Barat yang menyudutkan Islam. Di Barat, khususnya di AS dan negara-negara Eropa, berbagai media massa dimanfaatkan untuk menghantam ajaran Islam. Hingga kini, beberapa film bioskop dan televisi yang menghina Islam, telah di-tayangkan. Sebagai contoh, film *Fitnah* adalah salah satu film yang benar-benar menyimpangkan Islam dan Al-Quran. Lebih dari itu, berita-berita minor sedemikian rupa dikemas media-media massa Barat untuk menggambarkan penganut ajaran Islam yang radikal dan terbelakang. Hal itu dapat dilihat dari pemberitaan minor dan penyimpangan fakta yang terjadi di Palestina, Irak dan Afghanistan.

Media-media Barat dari koran, radio hingga televisi, secara kompak mempropagandakan anti Islam melalui artikel dan karikatur-karikatur yang mendiskreditkan agama ini. Denmark adalah Negara yang cukup dikenal mempublikasikan karikatur penghinaan terhadap Nabi Besar Muhammad Saw, bahkan hal itu dilakukan hingga beberapa kali. Belakangan ini, ada sebuah hasil survei yang di publikasikan harian *The Guardian* yang menyebutkan kalangan politisi dan media massa di Inggris adalah penyebab kebencian masyarakat luas terhadap Islam. Menurut hasil survei yang dilakukan wartawan Inggris bernama Peter Osborne itu, politisi dan media Inggris kerap mengobarkan kebencian terhadap umat Islam dengan menggambarkan umat Islam sebagai teroris yang berusaha melakukan Islamisasi di Inggris.

Studi serupa juga dilakukan oleh pusat penelitian Muslim Eropa di Universitas Exeter London. Dari hasil studi yang disusun oleh perguruan tinggi ini ditemukan beberapa bukti empiris yang menjelaskan perilaku para politisi dan media Inggris itu. Menurut penelitian ini, meningkatnya sentimen masyarakat Inggris terhadap umat Islam dikarenakan pandangan dan pencitraan buruk yang dilakukan oleh keduanya,

politisi dan media massa. Hasil survei dan studi itu dibenarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), baru-baru ini. Menurut laporan tahunan tentang hak asasi manusia (HAM) yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS, umat Muslim di seluruh daratan Eropa masih mengalami diskriminasi. Bahkan, dari tahun ketahun diskriminasi yang dirasakan umat Islam di Eropa semakin mengkhawatirkan.

Di tengah kondisi seperti ini, tentu perlu mengkaji segala potensi yang dimiliki oleh dunia Islam untuk menghadapi berbagai sikap sentimen Barat atas Islam. Salah satu misi utama media-media Islam yang ditekankan adalah menjawab segala tuduhan yang tak berdasar dan mencerminkan hakekat Islam yang tertuang dalam doktrinasi agama ini.

Kini, seorang Da'i perlu menyadari bahwa media dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menghadapi propaganda anti Islam. Melalui media, ummat Islam juga dapat mengcounter isu-isu minor yang memojokkan agama ini. Dengan menguasai industri media yang ada. Melalui media tersebutlah, pemikiran seorang da'i dapat disebar. Untuk bisa diterima oleh media industri harus pula mengikuti mekanisme industri. Artinya, tidak memiliki media massa bukankah berarti tidak mungkin seorang Da'i tidak bisa melancarkan pemikirannya Dakwahnya kepada ummat.

Selain itu, hal yang juga dapat dilakukan adalah penulisan buku, makalah dan wawancara dengan para pakar yang mengulas tentang potensi ajaran Islam untuk menyelesaikan problema manusia yang sekaligus menjawab isu-isu miring tentang agama langit ini. Meski sebagian agenda dalam mengcounter propaganda anti Islam sudah dilakukan, namun upaya itu masih belum cukup menyusul propaganda luas Barat yang terus menyuarakan anti Islam. Tentu saja pekerjaan rumah bagi praktisi media Islam di Indonesia adalah bagaimana menampilkan wajah ideologi dakwah dalam media Islam Indonesia yang lebih mengutamakan pencerahan, penyadaran dan perdamaian dengan memegang teguh sifat-sifat Rasulullah (*Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah*) sebagai kode etik seorang Da'i. Harapannya masyarakat informasi dapat merasakan peran media Islam sebagai *rahmatan lil alamiin*, bukan hanya sebagai *rahmatan lil muslimin* sebagaimana yang selama ini dimainkan oleh media Islam yang cenderung menggunakan ideologi Da'i sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.

KESIMPULAN

Surat kabar di nusantara menjadi bagian dari dinamika Islam Indonesia. Berbagai pemikiran dan gerakan menjadikan surat kabar sebagai sebuah gerakan dakwah. Selain digunakan oleh organisasi-organisasi massa Islam, juga digunakan partai-partai Islam. Tokoh-tokoh cendekiawan Islam juga memiliki media cetak sebagai alat propaganda. Sebelumnya, media cetak diterbitkan lebih banyak dilandasi idealisme perjuangan pemikiran dari pada dilandasi komersialisme.

Ketika perkembangan teknologi informasi dapat dinikmati publik, media cetak tetap menjadi sarana untuk menyebarkan pemikiran. Hanya saja, ada perubahan yang mendasar, ketika media massa merupakan bagian dari industri informasi dan cendekiawan muslim tidak memiliki media. Media dikuasai para pebisnis. Akibatnya, wahana informasi yang dapat memengaruhi bagi cendekiawan muslim menjadi terbatas. Hanya mereka yang mampu dan diterima oleh media saja yang bisa memberi pemikiran. Selebihnya, tidak ikut ambil bagian di media.

Perlu ada strategi baru agar seorang Da'i masih dapat menyebarkan pemikiran Dakwahnya ke ruang publik. Salah satu jalannya, seperti menguasai media massa industri dengan mengikuti pola industri tanpa meninggalkan misi pemikiran dan gerakan Dakwah. Selain itu, pengkaderan seorang Da'i baru sangatlah penting agar beberapa masa ke depan, seorang Da'i baru dapat menguasai media massa dalam Dakwahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, New York: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971.
- Abidin, Mas'ood, *Ensiklopedia Minangkabau*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005.
- Amir, Mafri, *Historiografi Pers Islam Indonesia*, Jakarta: Quantum, 2000.
- Azra, Azyumardi, Jarman *Ulama Timuz Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Transmission of al-Manar Reformisme to the Malay-Indonesian World: the case of al-Imam and al-Munir*, New York & Canada, Routledge, 2006.
- Azwar, Nasrul, *Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu*, Opini Harian Pagi Padang Ekspres, 2007.
- Banda, Harry J., *Bulan Szbit den Matahari Terblt: Islam Indonesia pdda Masa Peridudukan Jepang*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980.
- Burhanudin, Jajat, *Ulama &: Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Mizan Publika, 2012.
- Chaniago, Danil M., Perempuan & Bergerak. *Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921*, Jurnal Kafaah, Jurnal Ilmiah Gender, Vol. IV No.1 Tahun 2014
- Darwis, Yuliandre, *Sejarah Perkembangan Pers Mlndngkabau 1859-1945*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Diminic, Strinati, *Popular Culture Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*, Terj. Abdul Mukhid, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.
- Drakkard, Jane, *A Kingdom oLWozd: Language and Power In Sumatra*, New York: Oxford University Press, 1999.
- KART, Bernad, *Komunikasi Bisnis Praktis*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1994.
- Mariana Ulfah, *Konstetasi Komodifikasi Media Massa dan Ideologi Muhammadiyah*, Jurnal
- Moh. Rosyid, *Membangkit Sejarah Islam di Tengah Terpaan Era Digital*. At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 1, Nomer 1, Januari-Juni 2013.

- Nurdien Harry Kistanto, *Agama & media Massa Tradisional dan Industrial*, Endogami: Jurnal Ilmiah kajian Antropologi, E-ISSN: 2599-1078.
- Roni Tabaroni, *Media Massa Islam Sejarah, Dinamika dan Peranannya di Masyarakat*, Yogyakarta: Calpulis).2017.
- Santi W.E Soekanto. *The Western Media dan Posperous Justice Part*. The Jakarta Post 24 Juni 2005.
- Sastri Sunarti. *Kajian Lintas media, Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbitan Awal di Minangkabau (1859-1940an*. Jakarta: KPG. 2013.
- Suwarno, S. (2020). THE GÜLEN MOVEMENT; PELAYAN SIPIL TANPA BATAS. *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 7(1), 98-120.
- Watson, *Islamic Books and Their Publishers: Notes on the Contemporary Indonesia Scence*. Journal of Islamic studies, 16. 2005.